

Katalog: 7102025.9107

# INDEKS

## KEMAHALAN KONSTRUKSI

### KABUPATEN SORONG 2023



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN SORONG**

Katalog: 7102025.9107

# INDEKS

## KEMAHALAN KONSTRUKSI KABUPATEN SORONG 2023





# **INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI (IKK) KABUPATEN SORONG 2023**

**No. Publikasi** : 91070.2345

**No. Katalog BPS** : 7102025.9107

**Ukuran Buku** : 14,8 X 21 cm

**Jumlah Halaman** : viii Romawi + 39 Halaman

**Penyunting** : BPS Kabupaten Sorong

**Naskah** : BPS Kabupaten Sorong

**Gambar Kulit** : BPS Kabupaten Sorong

**Diterbitkan Oleh** : BPS Kabupaten Sorong

**Dicetak Oleh** : BPS Kabupaten Sorong

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan,  
mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian  
atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa  
izin tertulis dari Badan Pusat Statistik



# **INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI (IKK) KABUPATEN SORONG 2023**

## **Anggota Tim Penyusun:**

Penanggung Jawab : Ratna M. H. Gusti, S.E., M.P

Penyunting : Abed Nego, S.E.

Penulis : Lutfi Hamdani Sutikno, S.Tr.Stat.

Gambar Kulit : Lutfi Hamdani Sutikno, S.Tr.Stat.

Pengolah Data : Badan Pusat Statistik – RI

<https://sorongkab.bps.go.id>





## KATA PENGANTAR

Publikasi “Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Sorong 2023” merupakan publikasi yang menyajikan angka dan penjelasan dari IKK Kabupaten Sorong Tahun 2023. Publikasi ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam membuat berbagai kebijakan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong yang berkaitan dengan sektor konstruksi serta sebagai bahan baku untuk penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU).

Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga publikasi ini dapat diterbitkan. Kritik dan saran sangat diharapkan dari pengguna publikasi ini guna perbaikan pada terbitan selanjutnya.

Sorong, Oktober 2023

Kepala BPS abupaten Sorong



Ratna M. H. Gusti, S.E., M.P

<https://sorongkab.bps.go.id>





## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan .....	5
BAB II KONSEP DAN DEFINISI .....	7
BAB III METODOLOGI .....	17
3.1 Ruang Lingkup dan Sumber Data .....	17
3.2 Metode Penghitungan IKK .....	17
3.3 IKK 2023 .....	23
BAB IV ANALISIS IKK KABUPATEN Sorong .....	25
4.1 Profil Kabupaten Sorong .....	25
4.2 IKK Kabupaten Sorong .....	29
BAB V KESIMPULAN .....	37
DAFTAR PUSTAKA .....	39



<https://sorongkab.bps.go.id>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan pada suatu daerah diarahkan untuk mengurangi kemiskinan dan mendorong upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah sejak 1 Januari 2001, merupakan salah satu bentuk dukungan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan pembangunan daerah.

Otonomi daerah yang dilaksanakan sejak 1 Januari 2001 memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah tersebut, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mendayagunakan potensi keuangan daerah sendiri serta sumber keuangan lain seperti perimbangan keuangan pusat dan daerah yang berupa Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dana Alokasi Umum merupakan transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam



upaya menutupi kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) yang terjadi antar daerah. Hal ini dilakukan dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya untuk melayani masyarakat.

Asas kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) yang mendasari penghitungan DAU tersebut memerlukan dukungan data yang valid, akurat, dan terkini sehingga pembagian DAU ke setiap daerah menjadi adil, proporsional, dan merata. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) menjadi komponen penting dalam perumusan DAU disamping jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), luas wilayah, dan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita.

IKK sendiri merupakan suatu indeks yang menggambarkan tingkat perbandingan harga barang konstruksi antar wilayah. Untuk menghitung IKK diperlukan beberapa data yaitu: harga bahan bangunan/konstruksi, harga sewa alat berat konstruksi, upah jasa konstruksi, dan bobot/diagram timbang. Data harga dan upah didapat dari Survei Serentak Harga Barang Bangunan/Konstruksi, Sewa Alat Berat, Upah Jasa Kontruksi dalam rangka penghitungan IKK yang



dilakukan setiap triwulan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

Sementara itu, bobot/diagram timbang IKK diperoleh dari *Bill of Quantity* (BoQ). BoQ merupakan realisasi pembangunan suatu konstruksi di kabupaten/kota yang bersangkutan. Realisasi pembangunan tersebut berupa nilai masing-masing bahan bangunan utama yang dibutuhkan untuk membangun 1 (satu) unit bangunan per satuan ukuran luas dari 5 (lima) jenis bangunan yang ditentukan.

Sebagai salah satu variabel yang digunakan untuk menghitung kebutuhan daerah, IKK berkaitan erat dengan keinginan dan tanggung jawab pemerintah untuk meningkatkan pelayanan dengan membangun sarana dan prasarana yang berupa bangunan fisik seperti: bangunan gedung, jalan, jembatan, saluran irigasi, dan lain sebagainya. Perbedaan kondisi dan potensi geografis di masing-masing wilayah serta jarak antar wilayah menyebabkan terjadinya perbedaan pembiayaan untuk membangun fasilitas-fasilitas tersebut. Hal inilah yang menjadi dasar digunakannya IKK untuk penyesuaian kebutuhan daerah dilihat dari sektor bangunan/konstruksi.



Mengingat kebutuhan akan pentingnya angka IKK sebagai komponen penghitungan DAU maka disusunlah publikasi “Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Sorong 2023” ini, dengan harapan bahwa data yang termuat dalam publikasi ini dapat digunakan sebagai acuan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan dalam rangka penghitungan DAU, serta bagi masyarakat, akademisi, atau pelaku usaha yang ingin melihat keterbandingan Kabupaten Sorong terhadap daerah-daerah lainnya dalam hal yang berkaitan dengan besaran biaya konstruksi.

<https://sorongkab.go.id>



## 1.2 Tujuan

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan penyusunan publikasi Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Sorong 2023 ini adalah:

1. Memberikan gambaran komponen-komponen penyusun IKK Kabupaten Sorong Tahun 2023;
2. Mengetahui berapa nilai IKK Kabupaten Sorong Tahun 2023;
3. Dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan daerah dan pembangunan daerah, sehingga perencanaan pembangunan Kabupaten Sorong ke depannya dapat lebih terarah dan tepat sasaran;
4. Merupakan salah satu ukuran yang dapat menjadi *starting point* bagi Pemerintah Kabupaten Sorong dalam perencanaan pembangunan sumber daya manusia Kabupaten Sorong pada tahun-tahun yang akan datang; dan
5. Untuk membantu pengambil kebijakan, peneliti, atau konsumen data lainnya dalam memahami keadaan masyarakat Kabupaten Sorong secara lebih spesifik.











## **BAB II**

### **KONSEP DAN DEFINISI**

Beberapa konsep dan definisi umum yang digunakan dalam proses pengumpulan data dan penghitungan IKK antara lain: konsep mengenai harga barang konstruksi termasuk harga sewa alat berat, pedagang besar, pedagang campuran, kegiatan konstruksi, tingkat kemahalan konstruksi, diagram timbang, dan indeks kemahalan konstruksi.

1. **Harga perdagangan besar (HPB)** adalah harga transaksi yang terjadi antara penjual/pedagang besar pertama dengan pembeli/pedagang besar berikutnya dalam jumlah besar pada pasar pertama untuk suatu barang.
2. **Harga produsen** adalah harga transaksi yang terjadi antara petani (penghasil) dan pembeli (pedagang besar/distributor) dalam jumlah besar di pasar pertama atas suatu barang.
3. **Harga eceran** adalah harga transaksi yang terjadi antara pedagang eceran sebagai penjual dengan konsumen sebagai pembeli secara



eceran/satuan yang digunakan untuk konsumsi langsung bukan untuk diperjualbelikan.

4. **Harga pedagang campuran** adalah harga transaksi yang terjadi antara pedagang yang menjual barang secara *party/grosir* dan juga menjual barang secara eceran dengan konsumen baik yang digunakan untuk konsumsi langsung atau konsumsi tidak langsung.
5. **HPB bahan bangunan/konstruksi** adalah harga berbagai jenis bahan bangunan yang digunakan dalam kegiatan konstruksi dalam jumlah besar (*party*) yang merupakan hasil transaksi antara pedagang besar/distributor/*supplier* bahan bangunan/konstruksi dengan pengguna bahan bangunan tersebut.
6. **Produsen** adalah penghasil barang-barang yang dilakukan baik secara manual maupun dengan bantuan mesin.
7. **Pedagang besar** adalah pengusaha/pedagang yang menjual bahan bangunan/konstruksi dalam jumlah besar (*party/grosir*).
8. **Pedagang campuran** adalah pedagang yang dalam menjual barang dagangannya sebagian dilakukan secara partai besar dan sebagian lagi

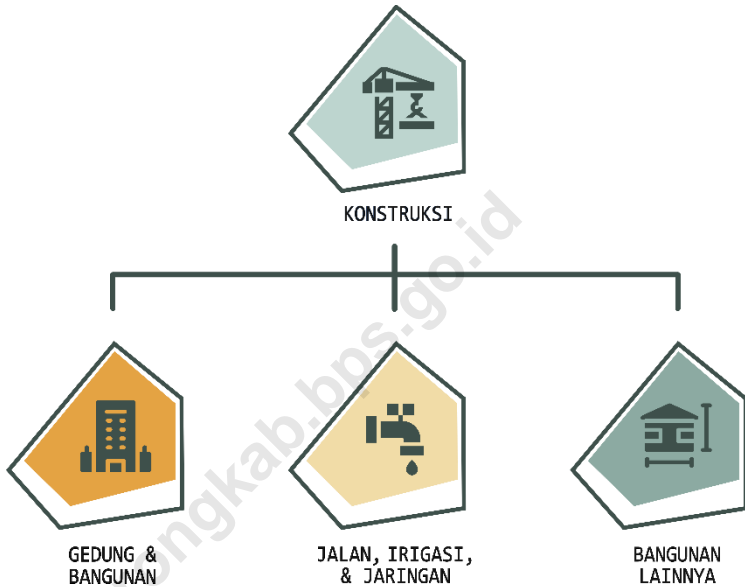


dilakukan secara eceran, sedangkan data harga yang dicatat adalah harga untuk penjualan barang dalam partai besar.

9. **Party/grosir** atau jumlah besar yang dimaksud adalah bukan eceran. Batasan ini relatif mengingat sulit menentukan besarnya, baik kuantitas maupun nilai dari suatu komoditas. Hal ini sangat tergantung dari karakteristik komoditasnya sendiri.
10. **Kegiatan konstruksi** adalah suatu kegiatan yang hasil akhirnya berupa bangunan/konstruksi yang menyatu dengan lahan tempat kedudukannya baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Kegiatan konstruksi meliputi perencanaan, persiapan, pembuatan, pembongkaran, dan perbaikan bangunan.

Sektor konstruksi diklasifikasikan kedalam tiga kategori yang disebut *basic heading* yang dapat dilihat seperti berikut:

Gambar 1.  
*Basic Heading*



Gedung dan bangunan yang termasuk dalam perhitungan diagram timbang IKK adalah sebagai berikut:

1. Gedung dan bangunan untuk tempat tinggal, meliputi rumah yang dibangun sendiri, *real estate*, rumah susun, dan perumahan dinas.
2. Gedung dan bangunan bukan untuk tempat tinggal meliputi gedung perkantoran, industri, kesehatan, tempat hiburan, tempat ibadah, terminal/stasiun, dan bangunan monumental.

Klasifikasi jalan, irigasi, dan jaringan yang termasuk dalam perhitungan diagram timbang IKK adalah sebagai berikut:

1. Bangunan umum untuk pekerjaan pertanian, terdiri dari:
  - a. Bangunan pengairan, meliputi pembangunan waduk (*reservoir*), bendungan (*weir*), embung, jaringan irigasi, pintu air, sipon dan drainase irigasi, talang, *check* dam, tanggul pengendali banjir, tanggul laut, krib, dan waduk.
  - b. Bangunan tempat proses hasil pertanian, meliputi bangunan penggilingan dan bangunan pengeringan.
2. Bangunan pekerjaan umum untuk jalan, jembatan, dan pelabuhan, terdiri dari:
  - a. Pembangunan jalan, jembatan, landasan pesawat terbang, pagar/tembok, drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu lalu lintas.

- b. Bangunan jalan dan jembatan kereta, meliputi pembangunan jalan dan jembatan kereta.
  - c. Bangunan dermaga, meliputi pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan dermaga/pelabuhan, sarana pelabuhan, dan penahan gelombang.
3. Bangunan untuk instalasi listrik, gas, air minum, dan komunikasi terdiri dari:
- a. Bangunan elektrikal, meliputi pembangkit tenaga listrik, transmisi, dan transmisi tegangan tinggi.
  - b. Konstruksi telekomunikasi udara, meliputi konstruksi bangunan telekomunikasi dan navigasi udara, bangunan pemancar/penerima radar, dan bangunan antena.
  - c. Konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api, meliputi pembangunan konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api.
  - d. Konstruksi sentral komunikasi, meliputi bangunan sentral telepon/telegraf, konstruksi bangunan menara pemancar/penerima radar *microwave*, dan





bangunan stasiun bumi kecil/stasiun satelit.

- e. Instalasi air, meliputi instalasi air bersih dan air limbah, dan saluran drainase pada gedung.
- f. Instalasi listrik, meliputi pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan lemah, dan pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan tinggi.
- g. Instalasi gas, meliputi pemasangan instalasi gas pada gedung tempat tinggal, dan pemasangan instalasi gas pada gedung bukan tempat tinggal.
- h. Instalasi listrik jalan, meliputi instalasi listrik jalan raya, instalasi listrik jalan kereta api, dan instalasi listrik lapangan udara.
- i. Instalasi jaringan pipa, meliputi jaringan pipa gas, jaringan air, dan jaringan minyak.

Sedangkan klasifikasi untuk bangunan lainnya terdiri dari bangunan terowongan, bangunan sipil lainnya (lapangan olahraga,



lapangan parkir, dan sarana lingkungan pemukiman), pemasangan perancah, pemasangan bangunan konstruksi prefab, dan pemasangan kerangka baja, pengerukan, konstruksi khusus lainnya, instalasi jaringan pipa, instalasi bangunan sipil lainnya, dekorasi eksterior, serta bangunan sipil lainnya termasuk peningkatan mutu tanah melalui pengeringan dan pengerukan.

11. **Harga sewa alat berat konstruksi** adalah harga yang terjadi ketika seseorang/ organisasi/institusi menyewa alat-alat berat yang digunakan untuk kegiatan konstruksi dalam periode tertentu seperti dalam waktu jam, hari, mingguan, dan bulanan. Harga sewa termasuk biaya sewa alat, jasa operator alat, tetapi tidak termasuk biaya mobilisasi alat dari penyewa ke lokasi proyek dan bahan bakar.
12. **Upah** adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Dalam kegiatan konstruksi, upah jasa konstruksi meliputi upah

mandor, kepala tukang, tukang, dan pembantu tukang.

13. **Paket komoditas** adalah sejumlah barang terpilih yang digunakan sebagai komponen penghitungan IKK. Komoditas/jenis barang tersebut dipilih karena memenuhi asas *representativeness* dan *comparability* yaitu andil yang cukup besar dan data harganya dapat dipantau serta mempunyai tingkat keterbandingan antar kabupaten/kota. Paket komoditas disebut juga sebagai kualitas nasional.
14. **Kualitas provinsi** adalah kualitas yang dominan disuatu provinsi tetapi tidak dominan bila ditinjau secara nasional. Kualitas provinsi digunakan sebagai dasar konversi kedalam kualitas nasional untuk kualitas nasional yang memang tidak terdapat di provinsi tersebut.
15. **Diagram timbang** atau bobot yang digunakan dalam penghitungan IKK 2023 terdiri dari diagram timbang IKK dengan pendekatan *Basket of Construction Components Approach* (BOCC) dan diagram timbang Umum. Diagram timbang umum yang digunakan dalam penghitungan IKK



2023 berasal dari realisasi anggaran daerah tingkat II (kabupaten/kota) untuk pembangunan konstruksi.

16. **Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)** adalah angka indeks yang menggambarkan perbandingan tingkat kemahalan konstruksi suatu kabupaten/kota atau provinsi terhadap tingkat kemahalan konstruksi rata-rata nasional.
17. **Bill of Quantity (BoQ)** adalah daftar dan kuantitas pekerjaan yang penyusunan dan perhitungannya didasarkan atas gambar lelang, spesifikasi teknis, dan spesifikasi umum yang digunakan sebagai standar acuan bagi peserta lelang dalam mengajukan penawaran harga.



## **BAB III**

### **METODOLOGI**

#### **3.1 Ruang Lingkup dan Sumber Data**

Data dasar yang digunakan dalam penghitungan IKK tahun 2023 adalah harga perdagangan besar bahan bangunan/konstruksi dan harga sewa alat berat yang diperoleh dari survei secara serentak seluruh kualitas dari jenis barang yang memberikan andil besar dalam pembuatan suatu bangunan/konstruksi di seluruh kabupaten/kota. Sebagai pendukung, terdapat juga data BoQ yang diperoleh melalui kerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum. BoQ yang digunakan dalam penghitungan IKK 2023 berupa realisasi pelaksanaan proyek menurut kelompok jenis pada tahun 2022 dan 2023.

#### **3.2 Metode Penghitungan IKK**

Komponen yang digunakan dalam penghitungan IKK didasarkan pada paket komoditas yang dipakai sebagai pendekatan dalam merumuskan Tingkat Kemahalan Konstruksi (TKK). TKK merupakan cerminan dari suatu nilai bangunan/konstruksi atau biaya yang dibutuhkan untuk membangun 1 (satu) unit bangunan/



konstruksi per satuan ukuran luas di suatu kabupaten/kota atau provinsi yang diperoleh melalui pendekatan terhadap sejumlah bahan bangunan, dan jasa yang menjadi paket komoditas. Paket komoditas yang dimaksud mencakup barang-barang natural/penggalian, barang-barang hasil industri, serta sewa alat berat dan jasa. Dalam menyusun paket komoditas ini didasarkan pada asas *comparability* (keterbandingan), *representativeness* (keterwakilan), dan *trade off comparability vs representativeness*.

Setelah paket komoditas didapatkan, maka dibutuhkan pula diagram timbang kelompok jenis bangunan. Diagram timbang ini disusun berdasarkan kuantitas/volume bahan bangunan dan jasa yang dibutuhkan untuk membangun satu unit bangunan per satuan ukuran luas ( $m^2$ ) menurut kelompok jenis bangunan/konstruksi.

Diagram timbang ini juga diperlukan untuk pembentukan TTK setiap jenis barang. Data-data dalam diagram timbang ini didapatkan dari BoQ dari berbagai pihak yang telah melaksanakan proyek konstruksi sepanjang tahun 2022 dan 2023. Kemudian untuk melengkapi komponen di atas diperlukan pula data harga bahan bangunan dan tarif sewa alat berat yang



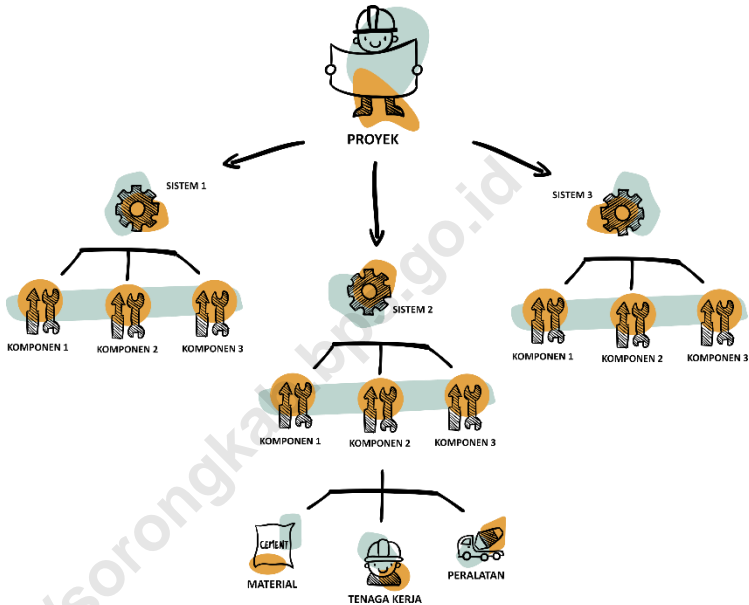
dikumpulkan melalui survei serentak yang dilaksanakan oleh BPS Kabupaten Sorong.

Diagram timbang pada IKK 2023 menggunakan pendekatan *Basket of Construction Components* (BOCC) yang didesain dengan tujuan perbandingan antar wilayah. Data harga yang dikumpulkan dalam IKK 2023 ini terdiri dari komponen konstruksi utama dan input dasar yang umum dalam suatu wilayah.

Komponen konstruksi adalah output fisik konstruksi yang diproduksi sebagai tahap *intermediate* dalam proyek konstruksi. Elemen kunci dalam proses pendekatan ini adalah semua harga yang diestimasi berhubungan dengan komponen yang dipasang, termasuk biaya material, tenaga kerja, dan peralatan. Tujuan penggunaan pendekatan BOCC adalah memberikan perbandingan harga konstruksi yang lebih sederhana dan biaya yang murah dan memungkinkan menggunakan metode BoQ.



Gambar 2.  
Hubungan antara proyek, sistem dan komponen



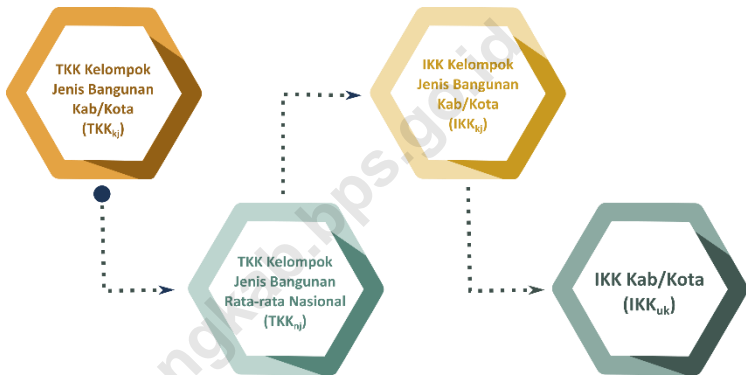
Biaya masing-masing komponen disusun dari biaya per unit dari material yang digunakan dan perkiraan kuantitas dari material, koefisien dan upah tenaga kerja, koefisien dan sewa peralatan yang digunakan untuk membangun komponen tersebut. Konsep yang mendasar dari pendekatan BOCC adalah mengukur relatif harga pada level komponen konstruksi. Sebuah komponen kemudian dibagi kembali kedalam beberapa item pekerjaan konstruksi. Setelah diperoleh



komponen-komponen penyusun IKK diatas maka dapat dilakukan penghitungan berdasarkan formula dengan alur seperti dibawah ini.

Gambar 3.

Alur Penghitungan IKK



Metode penghitungan IKK di tahun 2023 menggunakan metode *Country Product Dummy* (CPD) dengan model statistik yaitu:

$$p_{kn} = a_k b_n u_{kn}$$

Dimana,

$p_{kn}$  = dimisalkan harga komponen konstruksi n di kabupaten k

$a_k$  dan  $b_n$  = parameter yang akan diduga dari data harga

$u_{kn}$  = random variabel yang berdistribusi



identik dan independen

$$k = 1, 2, \dots, K$$

$$n = 1, 2, \dots, N$$

Dengan asumsi bahwa random variabel ini berdistribusi log normal atau dengan kata lain  $\log p_{kn}$  berdistribusi normal dengan mean 0 dan varian  $\sigma^2$ , sehingga dalam bentuk logaritma model di atas berbentuk linear.

$$\begin{aligned} \ln p_{kn} &= \ln a_k + \ln b_n + \ln u_{kn} \\ &= \alpha_k + \gamma_n + V_{kn} \end{aligned}$$

Parameter  $a_k$  diartikan sebagai tingkat harga konstruksi di kabupaten k relatif terhadap harga konstruksi di kabupaten lain yang sedang dibandingkan. Bila  $a_k$  dinyatakan sebagai relatif harga konstruksi terhadap kabupaten yang dijadikan referensi, katakan Kabupaten X. Maka,  $a_k$  adalah harga konstruksi di Kabupaten K relatif terhadap 1 (satu), yaitu harga di Kabupaten X. Dengan kata lain harga konstruksi di Kabupaten K 'setinggi'  $a_k$  dibanding harga konstruksi di Kabupaten X. Karena IKK di Kabupaten K dinyatakan dengan  $IKK_k = \exp(a_k)$ . Persamaan diatas dikalikan dengan 100 sehingga perbandingan data dinyatakan dalam persen.



### 3.3 IKK 2023

IKK telah dihitung sejak tahun 2003. Penimbang yang digunakan untuk menghitung IKK adalah BoQ tahun 2003. Perkembangan teknik sipil sangat cepat ditambah lagi dengan pesatnya industri bahan bangunan. Saat ini material yang digunakan untuk kegiatan konstruksi sudah banyak yang berubah atau muncul model baru seperti batako ringan, atap baja ringan, kusen aluminium, dan sebagainya. Peraturan pemerintah baik pusat maupun daerah yang mempengaruhi kegiatan konstruksi juga banyak berubah. Hal-hal tersebut mengakibatkan BoQ 2003 yang selama ini digunakan untuk menghitung IKK tidak lagi sesuai dengan kondisi di lapangan. Oleh karena itu mulai tahun 2013 penghitungan IKK sudah menggunakan BoQ terbaru yang dikumpulkan pada tahun 2012. Sedangkan IKK tahun 2023 menggunakan penimbang yang lebih lengkap dan *up to date* yaitu menggunakan *updating* BoQ sampai tahun 2022.

IKK tahun 2023 menggunakan data harga komoditi konstruksi, sewa alat berat dan upah jasa konstruksi yang dikumpulkan dalam 4 periode pencacahan yaitu akhir Juli 2022, akhir Oktober 2022,



akhir Januari 2023, dan akhir April 2023. Seperti halnya IKK tahun 2022, IKK tahun 2023 menggunakan 4 periode pencacahan dikarenakan periode tersebut mencakup masa perencanaan dan pembangunan suatu proyek konstruksi sehingga lebih menggambarkan fluktuasi harga di bidang konstruksi.

<https://sorongkab.bps.go.id>



## **BAB IV**

### **ANALISIS IKK KABUPATEN SORONG**

#### **4.1 Profil Kabupaten Sorong**

Kabupaten Sorong adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua Barat yang telah melahirkan 5 daerah otonom baru yaitu Kota Sorong, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Tambrau. Luas wilayah Kabupaten Sorong mencapai sebesar 13.075,28 Km<sup>2</sup>.

Gambar 4.  
Peta Wilayah Kabupaten Sorong



Secara geografis, Kabupaten Sorong terletak pada koordinat 00° 33' 42" hingga 01° 35' 29" Lintang Selatan

dan 130° 40' 49" hingga 132° 13' 48" Bujur Timur. Sedangkan batas administratif Kabupaten Sorong adalah sebagai berikut:

- Utara : Samudera Pasifik dan Selat Dampir
- Selatan : Laut Seram
- Timur : Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Sorong Selatan
- Barat : Kota Sorong, Kabupaten Raja Ampat, dan Laut Seram

Jika dilihat berdasarkan topografi wilayah, maka bentuk permukaan bumi atau morfologi wilayah Kabupaten Sorong adalah dataran rendah yang dimulai dari sebelah barat dan semakin ke timur merupakan wilayah pegunungan atau dataran tinggi. Wilayah Kabupaten Sorong memiliki ketinggian dari 0 hingga 2.582 meter di atas permukaan laut.

Dataran rendah dan berawa dengan ketinggian 0 hingga 100 meter di atas permukaan laut terdapat di bagian barat dan selatan (sekitar 25 persen dari total luas wilayah Kabupaten Sorong), sedangkan daerah pegunungan atau dataran tinggi dengan ketinggian 100 hingga 2.582 meter di atas permukaan laut terdapat di bagian utara dan timur, atau sekitar 60 persen dari total luas wilayah Kabupaten Sorong.

Pada tahun 2023 Kabupaten Sorong memiliki jumlah penduduk sebanyak 121.963 jiwa yang tersebar di 30 kecamatan/distrik. Dengan luas wilayah sebesar ±13.075,28 Km<sup>2</sup>, kepadatan penduduk Kabupaten Sorong pada tahun 2022 sebesar 9,33 jiwa/Km<sup>2</sup>. Salah satu tujuan pembangunan yang berkaitan dengan kependudukan adalah meningkatkan pemerataan persebaran penduduk. Melalui pemerataan penduduk, secara umum dapat membantu dalam usaha peningkatan kesejahteraan penduduk. Oleh karena itu idealnya adalah komposisi jumlah penduduk sejalan dengan luas wilayah keruangan suatu wilayah.

Tabel 1.  
Jumlah Penduduk, Luas wilayah, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Sorong Tahun 2022

No	Distrik	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km <sup>2</sup> )
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Klaso	606	345,03	1,76
2.	Saengkeduk	567	395,74	1,43
3.	Makbon	3.294	690,06	4,77
4.	Klayili	1.212	394,32	3,07
5.	Beraur	898	540,77	1,66
6.	Bagun	434	443,61	0,98



No	Distrik	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km <sup>2</sup> )
7.	Botain	121	349,74	0,35
8.	Klamono	5.943	492,90	12,06
9.	Klasafet	1.041	246,45	4,22
10.	Malabotom	1.146	443,61	2,58
11.	Klabot	646	394,32	1,64
12.	Buk	722	345,03	2,09
13.	Klawak	836	591,48	1,41
14.	Konhir	592	394,32	1,50
15.	Hobard	371	345,03	1,08
16.	Salawati	12.774	345,03	37,02
17.	Mayamuk	14.613	542,19	26,95
18.	Moisigin	3.783	443,61	8,53
19.	Seget	4.282	443,61	9,65
20.	Segun	1.609	443,61	3,63
21.	Salawati Selatan	1.219	295,74	4,12
22.	Salawati Tengah	1.538	492,90	3,12
23.	Aimas	46.195	690,06	66,94
24.	Mariat	17.449	542,19	32,18
25.	Sorong	829	443,61	1,87
26.	Sayosa	1.078	398,19	2,71
27.	Wemak	766	395,74	1,94
28.	Sayosa Timur	449	395,74	1,13
29.	Maudus	515	443,61	1,16
30.	Sunook	421	347,04	1,21

Sumber: BPS, Kabupaten Sorong dalam Angka 2022



## 4.2 IKK Kabupaten Sorong

Indeks Kemahalan Konstruksi merupakan angka indeks yang menggambarkan perbandingan Tingkat Kemahalan Konstruksi (TKK) suatu kabupaten/kota atau provinsi terhadap TKK secara rata-rata Nasional. Semakin tinggi IKK suatu daerah, maka biaya yang diperlukan untuk membuat suatu bangunan juga semakin besar, atau dengan kata lain kegiatan distribusi bahan bangunan/ konstruksi di daerah tersebut lebih sulit jika dibandingkan daerah lainnya. IKK yang rendah menunjukkan adanya nilai tambah suatu daerah terkait distribusi bahan bangunan/konstruksi yang berjalan baik dan kemudahan dalam membuat suatu bangunan. Adapun hasil penghitungan IKK kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat Daya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.  
IKK Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Daya  
Tahun 2019 – 2023

No	Kabupaten	Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)				
		2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Raja Ampat	131,12	125,22	131,59	124,79	118,04

No	Kabupaten	Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)				
		2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>2.</b>	<b>Sorong</b>	<b>127,39</b>	<b>119,93</b>	<b>116,23</b>	<b>115,09</b>	<b>117,78</b>
3.	Sorong Selatan	129,04	128,36	138,18	118,97	119,36
4.	Maybrat	122,63	132,47	131,92	128,63	128,25
5.	Tambrauw	129,16	128,92	128,54	130,39	133,79
6.	Kota Sorong	113,03	109,25	115,79	117,26	115,04

Sumber: Badan Pusat Statistik

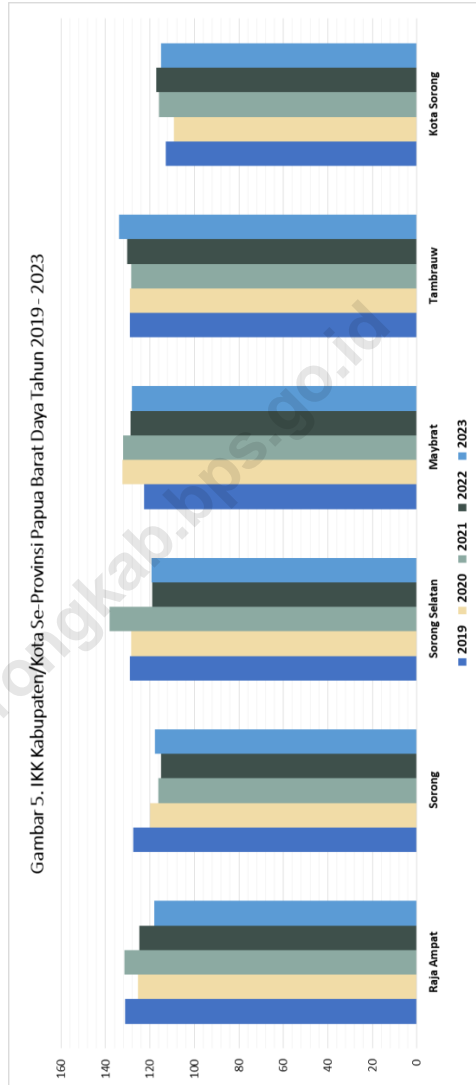
Dari 6 kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat Daya, 3 kabupaten/kota yang memiliki IKK tertinggi pada tahun 2023 adalah Kabupaten Tambrauw sebesar 133,79; Kabupaten Maybrat sebesar 128,25; dan Kabupaten Sorong Selatan sebesar 119,36. Sedangkan 3 kabupaten/kota yang memiliki IKK terendah yaitu Kota Sorong sebesar 115,04; Kabupaten Sorong sebesar 117,78; dan Kabupaten Raja Ampat sebesar 118,04.

Secara umum, terjadi fluktuasi angka IKK Tahun 2022 pada kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat Daya. Pada tahun 2023, Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, dan Tambrauw mengalami kenaikan IKK masing-masing sebesar 2,69 poin, 0,39 poin, dan 3,40 poin. Sedangkan Kabupaten Raja Ampat, Maybrat, dan Kota Sorong mengalami penurunan IKK masing-masing sebesar 6,75

poin, 0,38 poin, dan 2,22 poin. Kabupaten Sorong sendiri menempati posisi ke-2 IKK terendah di seluruh Provinsi Papua Barat Daya sebesar 117,78 walaupun angka ini mengalami kenaikan sebesar 2,69 poin dibanding tahun 2022.

<https://sorongkab.bps.go.id>

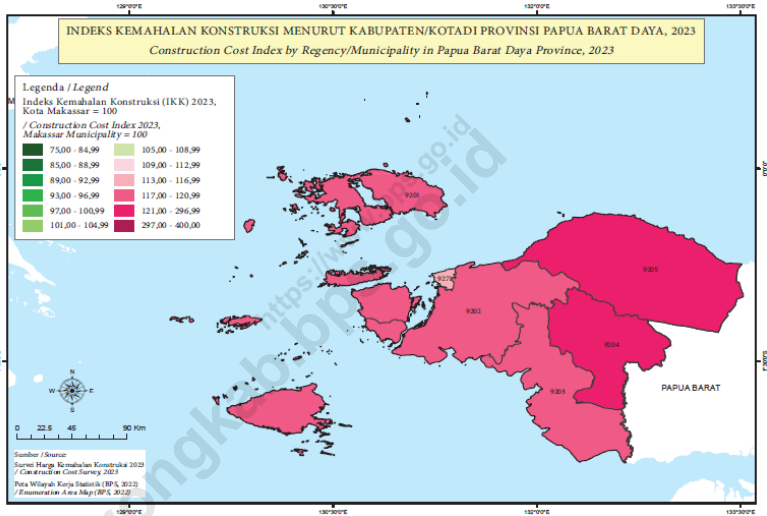




Sumber: BPS, Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi Papua Barat Daya 2019-2023, Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota 2023



Gambar 6.  
 IKK Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Daya  
 Tahun 2023



Sumber: BPS, Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota 2023

Jarak yang dekat antara Kabupaten Sorong dan Kota Sorong yang merupakan pintu masuk barang-barang konstruksi dari luar wilayah Provinsi Papua Barat, semakin mempermudah arus masuk barang/bahan bangunan/konstruksi di Kabupaten Sorong. Pada umumnya barang/bahan bangunan/konstruksi di Kabupaten Sorong berasal dari Kota Sorong, tetapi barang/bahan konstruksi tersebut juga ada yang



didatangkan langsung dari luar wilayah Kabupaten Sorong dengan jalur pengiriman melalui pelabuhan Kota Sorong.

Disisi lain, Kabupaten Sorong yang memiliki sarana dan prasarana yang sangat baik, seperti infrastruktur jalan dan jembatan yang sudah memadai sehingga arus distribusi barang-barang konstruksi dari Kota Sorong ke Kabupaten Sorong menjadi lancar. Lancarnya arus distribusi yang didukung oleh sarana dan prasarana yang baik dapat menekan biaya transportasi sehingga harga barang/bahan konstruksi di Kabupaten Sorong cenderung mendekati harga barang/konstruksi di Kota Sorong.

Pemakaian barang/bahan konstruksi yang berasal dari luar wilayah Kabupaten Sorong masih lebih besar bila dibandingkan dengan komoditas yang berasal dan dihasilkan di Kabupaten Sorong. Bangunan konstruksi memerlukan berbagai macam jenis barang/bahan konstruksi yang saling melengkapi mulai dari pasir, batu, batu-bata, kayu, besi, semen, kaca, pipa, seng, aspal dan sebagainya hingga penggunaan alat berat.

Diantara barang-barang konstruksi tersebut beberapa diantaranya dapat dihasilkan di Kabupaten Sorong tanpa harus didatangkan dari luar wilayah

Kabupaten Sorong, seperti pasir, batu dan kayu. Harga komoditas lokal tersebut tercatat relatif lebih murah dibandingkan harga rata-rata produk sejenis di Provinsi Papua Barat Daya. Jadi dapat dikatakan IKK Kabupaten Sorong lebih didominasi oleh barang/bahan konstruksi yang didatangkan dari luar wilayah Kabupaten Sorong.

<https://sorongkab.bps.go.id>





## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Komponen – komponen penyusun IKK Kabupaten Sorong Tahun 2023 antara lain harga bahan bangunan/konstruksi, harga sewa alat berat konstruksi, upah jasa konstruksi, dan bobot/diagram timbang.
2. Pada tahun 2023 Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Sorong sebesar 117,78. IKK Kabupaten Sorong tahun 2023 berada pada posisi kedua terendah dari 6 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Daya.









## DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. 2023. *Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota 2023.*

Badan Pusat Statistik. 2019. *Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi Papua Barat 2019.*

Badan Pusat Statistik. 2020. *Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi Papua Barat 2020.*

Badan Pusat Statistik. 2021. *Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi Papua Barat 2021.*

Badan Pusat Statistik. 2022. *Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi Papua Barat 2022.*

Badan Pusat Statistik. 2023. *Kabupaten Sorong Dalam Angka 2022.*

UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

